

ABSTRAK

Implementasi Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 04 Tahun 2011 Tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima di Jalan A. H. Nasution Kota Bandung.

Kebijakan merupakan suatu cara yang dikeluarkan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Kebijakan dilaksanakan di Kabupaten Kota seluruh Indonesia, setiap daerah menyelesaikan kebijakan ini melalui Perda, masing-masing daerah termasuk Kota Bandung menyelesaikan permasalahan melalui Perda No.4 Tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan PKL. Perda Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 ini dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bandung untuk menyelesaikan permasalahan PKL. Fenomena yang terjadi pada penelitian awal ini adalah masih banyak ditemukan PKL yang berjualan di jalan A. H. Nasution Kota Bandung, padahal jalan tersebut termasuk jalan yang masuk dalam zona merah dimana pedagang dilarang berjualan di area tersebut.

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana implementasi dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 tentang penataan dan pembinaan PKL di jalan A. H. Nasution Kota Bandung.

Penelitian ini terdiri dari satu variabel, yaitu implementasi kebijakan. Penulis menggunakan teori George C. Edward III dimana keberhasilan kebijakan dapat dilihat dari empat indikator yaitu : (1) Komunikasi, (2) Sumber Daya, (3) Disposisi, dan (4) Struktur Birokrasi.

Metode penelitian menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Informan pada penelitian ini adalah petugas Satpol PP dan PKL. Untuk mengetahui bagaimana implementasi perda ini digunakan langkah-langkah analisis data dari hasil wawancara menurut Miles dan Huberman yang terdiri atas tiga tahap yaitu : (1) Tahap reduksi data, (2) Tahap display data, (3) Tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Berdasarkan hasil pengolahan data didapat hasil bahwasanya implementasi Perda No. 4 Tahun 2011 ini belum berjalan maksimal, karena masih banyak PKL yang ditemukan masih berjualan di zona merah. Penyebabnya karena kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Satpol PP, kurangnya pengawasan disebabkan karena minimnya jumlah petugas Satpol PP, kurangnya komunikasi dan kordinasi dengan pihak terkait dan jauhnya jalan A. H. Nasution dari kantor Satpol PP sehingga menyulitkan pengawasan. Jalan A. H. Nasution merupakan jalan yang termasuk dalam zona merah menurut Perda No. 4 Tahun 2011.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Peraturan Daerah, Pedagang Kaki Lima

ABSTRACT

Implementation of Bandung City Regional Regulation Number 04 of 2011 concerning Arrangement and Development of Street Vendors on A. H. Nasution Street Bandung City

Policy is a way issued by the government to solve problems that occur in society. The policy is implemented in City Regencies throughout Indonesia, each region finalizes this policy through Perda, each region including the City of Bandung resolves the problem through Perda No. 4 of 2011 concerning structuring and fostering street vendors. Bandung City Regional Regulation No. 4 of 2011 was issued by the government of the city of Bandung to resolve street vendors' problems. The phenomenon that occurred in this initial study was that there were still many street vendors selling on A. H. Nasution Street Bandung City, even though this road is included in the red zone where traders are prohibited from selling in that area.

This research is intended to find out how the implementation and constraints faced in the implementation of Bandung City Regional Regulation No. 4 of 2011 concerning the arrangement and development of street vendors on A. H. Nasution Street Bandung City.

This research consists of one variable, namely policy implementation. The author uses the theory of George C. Edward III where the success of the policy can be seen from four indicators, namely: (1) Communication, (2) Resources, (3) Disposition, and (4) Bureaucratic Structure.

The research method uses a descriptive method with a qualitative approach, the type of data used is primary and secondary data. Data collection techniques through interviews, observation, and literature study. The informants in this study were Satpol PP officers and street vendors. To find out how this regional regulation is implemented, data analysis steps are used from the results of interviews according to Miles and Huberman which consist of three stages, namely: (1) data reduction stage, (2) data display stage, (3) conclusion and verification stage.

Based on the results of data processing, it was found that the implementation of Regional Regulation No. 4 of 2011 has not run optimally, because there are still many street vendors found selling in the red zone. The reason is due to the lack of supervision carried out by the Satpol PP, the lack of supervision due to the minimum number of Satpol PP officers, the lack of communication and coordination with related parties and the distance of Jalan A. H. Nasution from the Satpol PP office making supervision difficult. A. H. Nasution Street is a road that is included in the red zone according to Regional Regulation No. 4 of 2011.

Keywords: Policy Implementation, Local Regulations, Street Vendors